

Kajian Pkn: Selandia Baru dan Indonesia

Nurlatifa¹, Ronaldo Zai², Samsuri³

Program Studi Magister PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta

Article Info

Article history:

Accepted: 16 Mei 2023

Publish: 01 Agustus 2023

Keywords:

Kebijakan Nasional

Kurikulum

Pendidikan Kewarganegaraan.

Article Info

Article history:

Diterima: 16 Mei 2023

Terbit: 01 Agustus 2023

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan di Selandia Baru dan Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk membentuk warga negara yang baik. Namun dalam pengimplementasiannya baik dalam sistem politik kebijakan nasional maupun konten kurikulumnya memiliki perbedaan yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem politik dan kebijakan nasional serta struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur atau kajian kepastakaan. Sejarah kurikulum Selandia Baru terdiri dari tiga era yang masing-masing ditandai oleh ketegangan sosial dan politik pada saat itu. Era pertama berjudul "pribumi versus colonial" (pra-kontak Eropa hingga awal 1900-an), era kedua (1900-1970-an) bertajuk "konservatif tradisional versus progresif liberal" dan era ketiga (1980-an hingga sekarang) adalah "kanan baru versus kiri liberal". Negara Indonesia sendiri juga memiliki dekade yang cukup panjang terkait dengan perubahan sistem politik dan kebijakan pendidikan nasional yang di dalamnya juga memuat perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung dari tahun 1947 sampai dengan 2020 yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dimuat dalam tiga kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, dan kurikulum pendidikan lingkungan. Sedangkan di Indonesia pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum formal tersendiri yaitu pada kurikulum merdeka dengan nomenklatur pendidikan Pancasila.

Abstract

In both Indonesia and New Zealand, citizenship education aims to educate good citizens. However, there are interesting differences to be investigated in its implementation, both in the national policy political system and the curriculum's content. The political system, national policies, and curriculum for civics education in New Zealand and Indonesia are all examined in this study. A literature review or literature review is the research method used. The three eras that make up the New Zealand history curriculum are each characterized by the social and political tensions of the time. The main period was named "native versus frontier" (pre-contact Europe until the mid-1900s), the subsequent time (1900-1970s) was named "conventional moderate versus moderate liberal," and the third period (1980s to introduce) was "correct new versus liberal left." In addition, Indonesia's political system and education policies have undergone significant shifts over the past ten years, including changes to the independent curriculum, which was used for citizenship education from 1947 to 2020. The social sciences curriculum, health, and physical education curriculum, and environmental education curriculum comprise the structure and content of the civics education curriculum in New Zealand. The independent curriculum with the Pancasila educational nomenclature is the formal curriculum that governs citizenship education in Indonesia.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Nurlatifa

Universitas Negeri Yogyakarta

Email : nurlatifaasril@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Selandia Baru, juga dikenal sebagai Aotearoa dalam bahasa Maori, yang artinya "Tanah Awan Putih Panjang," Inggris: Latin, Selandia Baru: Nova Zeelandia) adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Laut Pasifik; sekitar 1.500 kilometer melintasi Laut Tasman, sebelah tenggara Australia; dan sekitar 1.000 kilometer selatan Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga, tiga negara kepulauan Pasifik. Negara ini terdiri dari dua pulau besar (Pulau Utara dan Pulau Selatan) dan beberapa pulau kecil lainnya. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru adalah sisa dari pulau-pulau yang ditempati oleh manusia.

Negara Selandia Baru meskipun secara geografis terpencil namun telah mengalami dakade yang cukup panjang mengenai penentuan kebijakan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan. Perubahan terhadap administrasi pendidikan dan revisi kurikulum wajib di Negara Selandia Baru selama tahun 1980-1990an terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai obat mujarab untuk penyakit sosial dan ekonomi yang terjadi di Selandia Baru (Mutch, 2003). Namun yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Barr (1998) dalam

artikelnya yang berjudul “Kewarganegaraan Tanpa Buku Teks” bahwa pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru tidak menjadi bidang kurikulum wajib. Jadi pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru tidak berdasarkan pada konten inti yang solid, tidak terdapat buku teks untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan secara umum, bahkan tujuan dari kurikulum dari kewarganegaraan dinyatakan dalam istilah yang sangat umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya program pendidikan kewarganegaraan formal di sekolah-sekolah Selandia Baru.

Pengajaran tentang pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dimuat secara umum dalam tiga kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta kurikulum pendidikan lingkungan (Mutch 2003; Milligan, Taylor, E. Wood; 2011). Jika menurut Kerr berbagai negara memiliki pendekatan yang bervariasi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan yang meliputi kewarganegaraan, ilmu sosial, studi sosial, studi dunia, studi masyarakat, keterampilan hidup dan pendidikan moral maka dalam konteks pendekatan pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru saat ini dapat dikatakan bahwa nilai-nilai, pendidikan lingkungan dan kesehatan dapat ditambahkan sebagai daftar pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan (Mutch, 2003).

Pada Kurikulum studi sosial nasional Selandia Baru, Ilmu Sosial dalam Kurikulum Selandia Baru (Kementerian Pendidikan Selandia Baru, 1997) dikatakan bahwa pendidikan studi sosial di Selandia Baru harus memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat sehingga dapat berubah menjadi “warga negara yang percaya diri, terinformasi dan bertanggung jawab” (Barr 1998; Tavich dan Kriebel; 2018). Meskipun demikian, tidak tertuang dalam kurikulum tersebut seperti apa dan bagaimana caranya agar tujuan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lain yang menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan formal di sekolah.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan di benua Asia. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sepuluh negara tetangga, termasuk India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, berbatasan dengan perairan teritorial Indonesia. Mirip dengan Selandia Baru, Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan. Di Selandia Baru, pelatihan kewarganegaraan ditekankan untuk ujian sosial, sementara di Indonesia pelatihan kewarganegaraan memiliki rencana pendidikan konvensional sendiri sebagai aturan untuk menunjukkan sekolah kewarganegaraan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pasal 37 UU No. 2 mengatur wajib belajar kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 20 Tahun 2003, yang mengatur tentang sistem pendidikan negara. Di Indonesia, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang baik. Anggota masyarakat produktif yang dimaksud adalah warga yang dapat menyadari, memahami, dan melaksanakan keistimewaan dan komitmennya sebagai warga, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, negara dan negara, cerdas, berbakat, dan memiliki kepribadian yang hebat. 2021).

Sejak implementasi kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum mandiri yang sekarang digunakan, Indonesia telah mengembangkan pendidikan kewarganegaraan selama beberapa dekade (Hidayati, 2020). Selama perubahan rencana pendidikan yang terjadi, terjadi perubahan klasifikasi pendidikan PKn, yang antara lain dikenal dengan nama Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pelajaran Kewarganegaraan, Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dan sampai sekarang, khususnya Instruksi Pancasila. Kurikulum PKn telah mengalami perubahan tidak hanya dari segi nomenklatur, tetapi juga dari segi isi kajian, metode, dan sistem penilaian (Raharjo, 2020).

Pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia secara praktis sama untuk membentuk anggota masyarakat produktif yang dapat mengambil bagian dalam kegiatan publik. Namun, menariknya bahwa strategi pendidikan kewarganegaraan di New Zealand terkandung dalam ujian persahabatan, yaitu program pendidikan sosiologi, program

pendidikan pelatihan kesejahteraan dan nyata, serta program pendidikan instruksional alami dan tidak menjadi pelatihan konvensional, sementara di Indonesia pelatihan kewarganegaraan terkandung dalam pengaturan pelatihan yang tepat yang diperlukan mulai dari tingkat Instruksi Dasar, Sekolah Opsional dan Pendidikan Lanjutan. Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji sistem politik dan kebijakan nasional, serta struktur dan isi kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Selandia Baru. Intinya melalui kajian ini cenderung pada komitmen terhadap informasi yang terkait dengan pelatihan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia dari bagian kerangka politik dan strategi publik serta konstruksi dan isi dari program pendidikan sekolah kewarganegaraan yang bersangkutan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi kepustakaan. Menurut Mardalis studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang terdiri dari penelitian terdahulu berkaitan dengan topik dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan (Hartanto & Dani, 2020). Menurut Kartiningasih metode studi literatur berkenaan dengan serangkaian proses pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sehingga memperoleh kesimpulan terkait dengan topik yang sedang diteliti (Rahayu, 2018).

Menurut Kartiningasih (Rahayu, 2018) studi literatur bertujuan untuk mencari landasar atau dasar pijakan untuk memperoleh dan membangun landasar teori, kerangka berfikir, dan untuk menentukan serta membuktikan dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis dalam penelitian. Hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan untuk menyimpulkan: (1) aspek sistem politik dan kebijakan nasional pendidikan kewarganegaraan di Selandia baru dan di Indonesia, (2) struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Konteks Nasional (Sistem Politik Dan Kebijakan Pendidikan Nasional)

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia

Sejarah kurikulum Selandia Baru terdiri dari tiga era yang masing-masing ditandai oleh ketegangan sosial dan politik pada saat itu. Era pertama berjudul “pribumi versus colonial” (pra-kontak Eropa hingga awal 1900-an), era kedua (1900-1970-an) bertajuk “konservatif tradisional versus progresif liberal” dan era ketiga (1980-an hingga sekarang) adalah “kanan baru versus kiri liberal” (Mutch, 2003). Pada Era pertama terjadi ketegangan antara pemerintah kolonial yang ingin membawa masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tetapi cerdas dan berjiwa tinggi serta penduduk pribumi yang memiliki sistem pendidikan yang kompleks dan efisien sebelum kedatangan pakeha (Eropa) sebagai penjajah. Awalnya sistem pendidikan masyarakat Maori berbeda dengan model industry di Inggris. Tetapi dengan cepat model Inggris dengan cepat diadopsi.

Pada tahun 1877, Undang-Undang terkait dengan pendidikan membentuk sekolah gratis, wajib, dan kurikuler dan sekuler dengan diadakannya kurikulum nasional. Kurikulum didasarkan pada model Inggris: membaca, menulis, aritmatika, tata bahasa dan komposisi bahasa Inggris, geografi, sejarah (dimana anak-anak dapat ditarik jika orang tua keberatan), sains dasar dan menggambar, pelajaran benda, dan musik vokal (dengan menjahit, menjahit dan ekonomi domestik untuk anak perempuan). Cita-Cita kewarganegaraan diajarkan melalui sejarah, kewarganegaraan geografi dan instruksi moral. McGee (1998) menyatakan tema dominan dari pelatihan karakter dan konten moral yang ditawarkan kepada massa di Inggris abad kedelapan belas dan kesembilan belas dibawa ke Selandia Baru oleh para kolonis awal. Bersamaan dengan prinsip-prinsip moral ini ada tema baru, yaitu kesetiaan kepada Kerajaan Inggris. Era ini berumur pendek yang pada akhirnya Maori terpinggirkan secara politik, ekonomi, dan pendidikan.

Era progresif tradisional konservatif versus liberal berfokus pada pengembangan sekolah menengah yang tetap mengikuti model Inggris yang mengarahkan siswa ke kursus akademik atau jurusan. Dengan munculnya ide-ide ideologi liberal-progresif maka internasionalisme dan consensus demokrasi diperkenalkan pada era ini. Seperti yang dikatakan Archer dan Openshaw (1992): Bersamaan dengan ketatnya etika kewarganegaraan yang lebih tua - kepatuhan, kesetiaan, dan tugas - ditetapkan keharusan baru dari liberal progresif yaitu persaudaraan manusia, pemahaman internasional, penghormatan terhadap budaya lain.

Pada Tahun 1942 untuk pertama kalinya kurikulum wajib di sekolah menengah memasukkan studi sosial. Ilmu-ilmu sosial menjadi kursus sejarah dan kewarganegaraan yang terintegrasi, geografi dan beberapa ekonomi deskriptif. Tahun 1970-an menandai era ketiga dalam sejarah pendidikan Selandia Baru di mana seruan untuk keadilan sosial bersaing dengan solusi ekonomi. Trowler (Mutch, 2003) menjelaskan bahwa ada dua alur ideologi kanan baru. Pertama, nilai-nilai neo-konservatif meliputi pemerintahan yang kuat, otoritarianisme sosial, masyarakat yang disiplin, hierarki, dan subordinasi. Kedua, nilai-nilai neo-liberal yang berfokus pada individu, kebebasan memilih, masyarakat pasar dan intervensi pemerintah yang minimal. Dua kekuatan dalam satu sudut pandang ideologis itu mengarah pada beberapa keputusan yang bertentangan dalam kebijakan pendidikan pada saat itu. Perlawanan ideologi, yang dijuluki oleh Barr (1998) sebagai “liberal kiri” telah digambarkan sebagai “perpaduan antara perspektif progresif liberal sebelumnya dan perspektif kritis sosial yang lebih baru” (Mutch, 2003).

Pada tahun 1991, dengan perubahan ideologi pemerintah, Menteri Pendidikan membahas tentang kurikulum inti yang didasarkan pada bahasa Inggris, matematika, sains dan teknologi. Kurikulum telah berubah dari dokumen yang terintegrasi dan liberal menjadi dokumen yang didasarkan pada retorika neo-konservatif saat itu, tetapi versi terakhirnya lebih sentris dan menjadi dokumen kebijakan formal. Kemudian pada tahun 1993 dirancang Kerangka Kurikulum Selandia Baru untuk mendukung semua pengembangan kurikulum yang diikuti dan pendidikan kewarganegaraan menjadi penekanan utama dalam kerangka baru khususnya dalam kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta kurikulum pendidikan lingkungan. Dengan adanya Kurikulum Selandia Baru memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka, untuk terus belajar sepanjang hidup, dan untuk berpartisipasi secara efektif dan produktif dalam masyarakat demokratis Selandia Baru. Nilai-nilai masyarakat demokratis kemudian secara khusus diuraikan: Kurikulum sekolah, melalui praktik dan prosedurnya, akan memperkuat nilai-nilai umum dari tanggung jawab individu dan kolektif yang menopang masyarakat demokratis Selandia Baru. Nilai-nilai tersebut antara lain kejujuran, dapat dipercaya, menghormati orang lain, menghormati hukum, toleransi (*rangimarie*), keadilan, kepedulian atau kasih sayang (*aroha*), non-seksisme, dan non-rasisme. Kurikulum sekolah akan membantu siswa untuk mengembangkan dan mengklarifikasi nilai dan keyakinan mereka sendiri, serta menghormati dan peka terhadap hak individu, keluarga, dan kelompok untuk memiliki sikap dan nilai yang berbeda dari mereka sendiri (Mutch, 2003). Namun bagaimana praktik dan prosedurnya tidak dijabarkan dengan jelas dalam kurikulum tetapi diserahkan kepada pelaksana kurikulum, yaitu sekolah untuk menentukan bagaimana cara menerapkannya.

Yang tak kalah menarik adalah pembahasan kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari transformasi kurikulum yang sangat cepat di Indonesia. “Setiap berganti menteri di Indonesia, kurikulumnya juga berubah,” ujar Alhamuddin (Raharjo, 2020). Penegasan ini didukung oleh pendapat Wong (Samsuri, 2011) yang menegaskan bahwa politik pendidikan memiliki akar intelektual sebagai bidang keilmuan. Oleh karena

itu, tidak mengherankan jika politik pendidikan juga akan memanfaatkan domain ilmu politik seperti kekuasaan, konflik, pengaruh, dan distribusi nilai-nilai otoritatif. Hal ini kemudian berdampak pada strategi persekolahan umum di Indonesia sehingga setiap terjadi pergantian imam, maka rencana pendidikan pelatihan pun berubah, termasuk program pendidikan pengajaran kewarganegaraan.

Sementara pendidikan kewarganegaraan diajarkan bersama IPS di Selandia Baru, seperti yang dinyatakan sebelumnya, kurikulum Indonesia telah mengalami banyak revisi sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013, dengan yang terbaru adalah Kurikulum Mandiri Tahun 2020. Nomenklatur Kewarganegaraan, yang hanya mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan bagaimana mereka dapat kehilangan kewarganegaraannya, merupakan bagian pertama dari pendidikan kewarganegaraan yang diterbitkan pada tahun 1957. Menteri PP dan K mengeluarkan SK No. 10 pada tanggal 10 Desember 1959, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. 122274, yaitu tentang pembentukan panitia yang akan bertanggung jawab untuk menulis buku pedoman tentang tanggung jawab dan hak warga negara Indonesia, serta sebagai topik yang akan mendidik warga tentang penyebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panel ini juga menang dalam hal memesan buku berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” pada tahun 1962. Buku ini kemudian digunakan sebagai pendamping mata pelajaran Kewarganegaraan yang muncul pada tahun 1961 (Muchson, 2004).

Rencana pendidikan 1968 lebih bersifat politis yang dicitrakan sebagai hasil dari Permohonan Lama. Pada tahun 1968, istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” digunakan untuk merujuk pada pendidikan kewarganegaraan. Pokok bahasan pokok mata pelajaran PKn 1968 terkait dengan pemaparan Pancasila sebagai falsafah negara yang dianggap menitikberatkan pada penyelidikan penyelenggaraan negara dan latar belakang sejarah perjuangan negara, sedangkan pandangan etisnya belum ada. tampak. Dalam rencana pendidikan tahun 1975, ajaran kebajikan yang secara umum akan diwibawa oleh negara melalui siklus instruktif pada masa Permohonan Baru secara resmi melalui Cetak Biru Strategi Negara (GBHN) tahun 1973 menyatakan wajibnya Pembinaan Moral Pancasila pada semua jenjang pendidikan. persekolahan (Samsuri, 2011).

Dari GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998 pada masa Permohonan Baru, bagaimana penjelasan pendidikan untuk membentuk kepribadian anggota masyarakat yang produktif diturunkan ke berbagai nama mata pelajaran, selain *metroschooling* dalam rincian Diklat Pancasila. Semuanya bermuara pada model pendidikan top-down pada akhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa daripada warga negara memilih kategorinya sendiri, interpretasi negara tentang apa yang merupakan kewarganegaraan yang baik dan buruklah yang menentukan kategori warga negara yang baik. Sebagai anggota struktur politik yang dikenal sebagai negara, warga negara tampaknya tidak sepenuhnya memahami diri mereka sendiri. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menggantikan Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1994. Mata kuliah ini menyatukan gagasan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Kewarganegaraan Negara (PKN) ketika dihubungkan dengan kurikulum sebelumnya (Raharjo, 2020).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dikembangkan pada tahun 2004 menggantikan Kurikulum 1994. Tiga komponen kualitas kewarganegaraan yang disarankan oleh Pusat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Standar Nasional Kewarganegaraan dan Pemerintahan pada tahun 1999 tampaknya telah dibawa oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan. Ketiga bagian tersebut adalah informasi kota (informasi kewarganegaraan), kemampuan perkotaan (kemampuan kotamadya), dan sikap kota

(karakter kewarganegaraan) (Samsuri, 2011). Berkenaan dengan PPKn, pada tahun 2006 program pendidikan berubah dari KBK menjadi program Pendidikan Tingkat Satuan Sekolah (KTSP). Dalam rencana pendidikan ini, mata pelajaran PKn di sekolah dasar pada umumnya tidak dikoordinir dengan mata pelajaran IPS, namun tetap berdiri sendiri sebagai mata pelajaran PKn. Begitu pula dengan mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran tersendiri di tingkat SMP dan SMA. Pendidikan Kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013. Penyembunyian moralitas Pancasila kalah jumlah dengan muatan materi terkait kewarganegaraan yang substansial. Selain itu, menurut Setiawati (2016), ada tiga aspek PPKn yang harus dicapai yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

3.2. Struktur dan Konten Kurikulum Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia

Seperti yang dikatakan oleh Barr (1998) bahwa tidak ada kurikulum pendidikan kewarganegaraan formal. Sebaliknya, diterapkan melalui pendekatan terpadu di seluruh kurikulum dan lebih khusus lagi melalui kurikulum ilmu sosial yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun (Nelson dan Kerr 2006). Kewarganegaraan disebut sebagai tujuan utama kurikulum studi sosial Selandia Baru sejak permulaannya (Archer dan Openshaw 1992; Barr 1998). Kurikulum Selandia Baru telah menegaskan kembali peran penting ilmu-ilmu sosial dalam memperluas konsepsi peserta didik tentang kewarganegaraan dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam masyarakat. Dalam kurikulum juga dikatakan bahwa ruang lingkup pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu “bagaimana orang dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang kritis, aktif, berpengetahuan dan bertanggung jawab” (Milligan, Taylor, E. Wood; 2011).

Meskipun tidak ada kurikulum formal pendidikan kewarganegaraan, namun dalam penelitian yang dilaporkan oleh Mutch (2003) penulis telah menentukan seperangkat kriteria pendidikan kewarganegaraan menurut Gilbert (1996) yang digunakan untuk menganalisis kurikulum yang diterapkan di Selandia Baru saat ini. Kriteria kewarganegaraan yang diambil dari Gilbert menguraikan empat pandangan utama terkait dengan kewarganegaraan: kewarganegaraan sebagai status yang menyiratkan hak dan kewajiban formal; kewarganegaraan sebagai identitas dan seperangkat kebajikan moral dan sosial berdasarkan cita-cita demokrasi; kewarganegaraan sebagai praktik publik yang dilakukan melalui proses hukum dan politik; dan kewarganegaraan sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam semua aspek kehidupan. Untuk kriteria yang ditentukan dalam penelitian, kategorinya sedikit diubah dengan pandangan utama yang kedua dipisahkan menjadi dua sehingga terdapat lima pendekatan kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan sebagai status; kewarganegaraan sebagai identitas; kewarganegaraan sebagai cita-cita demokrasi; kewarganegaraan sebagai praktik publik; dan kewarganegaraan sebagai partisipasi (Mutch, 2003).

Lima pendekatan ini kemudian dicocokkan dengan tiga dokumen kurikulum pendidikan yang memuat pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, dan kurikulum pendidikan lingkungan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Lima pendekatan kewarganegaraan di tiga dokumen kurikulum yang dipilih

Lima pendekatan kewarganegaraan (Gilbert, 1996)	Ilmu Sosial dalam Kurikulum Selandia Baru (1997)	Kesehatan dan Pendidikan Jasmani dalam Kurikulum	Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum Selandia Baru (1999)
---	--	--	--

		Selandia Baru (1999)	
Kewarganegaraan sebagai status	Organisasi sosial Hak, dan proses; Tanggung jawab dan hak	Hak, tanggung jawab dan hukum	
Kewarganegaraan sebagai identitas	Grup; Warisan; Budaya; Identitas Nasional; Keyakinan dan ide	Hubungan; Kemampuan interpersonal	Saling Ketergantungan; Keanekaragaman hayati
Kewarganegaraan sebagai demokratis yang ideal	Nilai; Masyarakat; Kepemimpinan; Pemerintah; Keadilan sosial		
Kewarganegaraan sebagai praktik publik	Aturan dan hukum; Institusi; Organisasi Internasional	Hak, tanggung jawab dan hukum; sumber daya masyarakat	Keberlanjutan
Kewarganegaraan sebagai partisipasi	Menyelesaikan perbedaan; Mengelola Sumber Daya Alam; Membuat Keputusan	Hubungan; Keterampilan Pribadi; Orang dan lingkungan	Bertanggung jawab untuk tindakan pribadi dan sosial

Tiga dokumen yang dipilih mencakup dua bidang kurikulum yang wajib di kelas 1-10 dan pilihan di kelas 11-13 (Ilmu sosial dan kesehatan dan pendidikan jasmani) dan satu bidang lintas kurikuler non-wajib (pendidikan lingkungan). Kurikulum ilmu sosial memiliki lima muatan konten kewarganegaraan yaitu organisasi sosial; budaya dan warisan; tempat dan lingkungan; waktu, kontinuitas dan perubahan; dan sumber daya dan kegiatan ekonomi. Dalam pembelajarannya memiliki tiga proses keterampilan: yaitu inkuiri; pengambilan keputusan sosial; dan eksplorasi nilai. Tujuan pencapaian yang merupakan contoh dari muatan kewarganegaraan meliputi bagaimana dan mengapa kelompok diorganisir, bagaimana kepemimpinan dijalankan, membuat dan menerapkan undang-undang, menanggapi tantangan dan perubahan, menjalankan hak dan tanggung jawab, memelihara keadilan sosial dan hak asasi manusia (Mutch, 2003).

Hal yang nampak tidak biasa yaitu dalam kesehatan dan pendidikan jasmani dan di Selandia Baru harus mengandung unsur pendidikan kewarganegaraan yang kuat. Kurikulum didasarkan pada empat konsep yaitu kesejahteraan (hauora), promosi kesehatan, perspektif sosio-ekologis, dan pentingnya sikap dan nilai yang mempromosikan kesejahteraan. Empat untaian konten yang mengembangkan ide-ide ini adalah kesehatan pribadi dan perkembangan fisik; konsep gerak dan keterampilan motorik; hubungan dengan orang lain; dan masyarakat serta lingkungan yang sehat (Mutch, 2003). Sedangkan dokumen pendidikan lingkungan mengklasifikasikan tiga jenis pendidikan lingkungan yaitu pendidikan tentang lingkungan, pendidikan di dalam lingkungan, dan pendidikan untuk atau dengan lingkungan. Kaitannya dengan ini sebagai warga Selandia Baru menghargai lingkungan untuk alasan rekreasi, estetika, ekonomi, budaya, dan spiritual. Masa depan Selandia Baru sebagai bangsa bergantung pada pemeliharaan lingkungan yang berkualitas (Mutch, 2003). Pedoman tersebut sengaja menggunakan pendekatan terpadu dan menguraikan bagaimana setiap aspek kurikulum wajib saling melengkapi. Pandangan kewarganegaraan dalam dokumen ini menekankan tanggung jawab individu dan kolektif serta kesadaran global.

Pendidikan di Indonesia saat ini secara bertahap mulai mengimplementasikan kurikulum baru yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu Kurikulum Merdeka. Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum merdeka kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pendidikan Pancasila dan dihilangkannya nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan. Dikutip dari laman kemendikbud.go.id, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan setidaknya tiga penjelasan utama tentang konsep belajar mandiri: teknologi untuk akselerasi, esensi keragaman, dan profil siswa Pancasila. Tentunya, poin pertama berkaitan dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Namun, ada beberapa poin yang sangat menarik, terutama pada poin 2 dan 3 yang utamanya berkaitan dengan PPKn. Poin-poin tersebut menekankan pentingnya keragaman, dengan pernyataan “keberagaman minat dan kemampuan siswa menjadi alasan terkuat untuk mengukur kinerja siswa agar tidak dinilai dengan angka-angka saja”. prestasi di sekolah, disamping berbagai kegiatan lain atau ekstrakurikuler. Pembelajaran juga sangat mengandalkan kearifan lokal. Konteks lokal akan membantu setiap siswa memahami materi dengan lebih baik. Setiap siswa akan mengkontekstualisasikan semua isi dan mata pelajaran.” Kemudian terkait dengan profil siswa di Pancasila. Pada saat yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa salah satu amanat Presiden adalah menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan. anak didik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan enam hal sebagai profil peserta didik Pancasila, pertama, dasar berpikir untuk mengatasi masalah, hal ini berkaitan dengan keterampilan berpikir, kedua, kemandirian, atau fakta bahwa siswa adalah mampu mencari ilmu dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya sendiri Ketiga, kreatif, dimana siswa dapat bereksperimen sendiri, memunculkan ide-ide baru, dan mengembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya (Raharjo, 2020).

Keempat, gotong-royong, di mana siswa belajar bagaimana bekerja sama sebagai sebuah tim, yang akan menjadi soft skill mereka yang paling berharga di masa depan. Kelima, keragaman global, yang bertujuan untuk menginspirasi siswa untuk menghargai keragaman budaya, agama, dan ras negara mereka dan dunia sambil juga menekankan bahwa mereka juga warga dunia. Mendikbud menyatakan, “Pendidikan karakter tentunya akan menjadi salah satu pilar inti.” Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi untuk mempersiapkan jiwa kerjasama bersama dan imajinasi siswa. “Tidak hanya dengan membaca materi dan kemudian dicoba, namun selain membuat karya. Oleh karena itu, saya memiliki moto: "Jika kita ingin mengubah pembelajaran di kelas, kita harus banyak bertanya, banyak mencoba, dan banyak bekerja." (Raharjo, 2020).

4. KESIMPULAN

Konteks nasional pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru terdiri dari tiga era. Era pertama berjudul “pribumi versus colonial” (pra-kontak Eropa hingga awal 1900-an), era kedua (1900-1970-an) bertajuk “konservatif tradisional versus progresif liberal” dan era ketiga (1980-an hingga sekarang) adalah “kanan baru versus kiri liberal” yang pada akhirnya tahun 1993 dirancang Kerangka Kurikulum Selandia Baru untuk mendukung semua pengembangan kurikulum yang diikuti dan pendidikan kewarganegaraan menjadi penekanan utama. Sedangkan Negara Indonesia juga memiliki dekade yang cukup Panjang terkait dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional khususnya pendidikan kewarganegaraan yang dimulai terjadi sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan yang terbaru yaitu 2020 yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Pada setiap era perubahan ini tidak hanya nomenklatur dari pendidikan kewarganegaraan saja yang berubah, tetapi juga terkait dengan konten materi, metode, penilaian, dan kebijakan lainnya terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan.

Struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru tidak diterapkan dalam kurikulum formal yang dibuktikan dengan tidak adanya program formal pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Selandia Baru. Pendidikan kewarganegaraan

diimplementasikan melalui pendekatan terpadu di tiga dokumen kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta kurikulum pendidikan lingkungan. Sedangkan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki muatan kurikulum formal tersendiri yang saat ini diatur dalam kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka dengan nomenklatur Pendidikan Pancasila. Hal yang menarik pada kurikulum merdeka ini terkait dengan pendidikan Pancasila yaitu adanya P5. P5 adalah proyek yang akan menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai peserta didik dengan kompetensi seperti yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Proyek ini diselenggarakan melalui penanaman karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Archer, E. & Openshaw, R. (1992) Citizenship as 'official' goals in social studies in New Zealand. In R. Openshaw (ed.) *New Zealand Social Studies: Past, Present and Future*. Palmerston North, New Zealand: Dunmore Press.
- Barr, H. (1998) Citizenship education without a textbook. *Children's Social and Economics Education*.
- Barr, H., Hunter, P. & Keown, P. (1999) The common good in the New Zealand social studies curriculum. A paper presented at the Annual Conference of the National Council for Social Studies, Orlando, Florida, USA, November.
- Cogan, J. (1997) *Multi-dimensional Citizenship: Education Policy for the Twenty-first Century*. Tokyo: Sasakawa Peace Foundation
- Gilbert, R. (1996) *Studying Society and Environment: A Handbook for Teachers*. Melbourne, Australia: Macmillan Education.
- Grossman, D. L., Lee, W. O., & Kennedy, K. J. (Ed.). (2008). *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific*. Springer.
- Hartanto, S. R., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad. *Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1), 1–6.
- Hidayat, E. N. (2021). Peningkatan Partisipasi Aktif Dan Hasil Belajar Ppkn Siswa Smp Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (Stad) Pada Materi Norma Dan Keadilan. *Jira: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(3), 312–334. <https://doi.org/10.47387/Jira.V2i3.100>
- Kerr, D. (2000) Citizenship Education: An international comparison across 16 countries. A paper presented at the American Educational Research Association Conference, New Orleans, USA, April, 2000.
- McGee, J. (1998) Curriculum in conflict: Historical development of citizenship in social studies. In P. Benson and R. Openshaw (eds.) *New Horizons for New Zealand Social Studies*.
- Milligan, A., Taylor, M., Wood, B. E. (2011). Teachers' conceptions of citizenship in New Zealand social studies education. *Citizenship Teaching and Learning*.
- Muchson. (2004). Pendidikan (An Kewarganegaraan Paradigma Baru Dan Implementasinya) Ditinjau Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Civic*, 1(1), 29–41.
- Mutch, C. (2003). Citizenship education in New Zealand: Inside or outside the curriculum? *Citizenship, Social and Economic Education*.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.20961/Pknp.V15i1.44901>
- Rahayu, R. S. (2018). Studi Literatur: Peranan Bahasa Inggris Untuk Tujuan Bisnis Dan Pemasaran. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 1(4), 149–158.
- Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi Di Indonesia Samsuri. *Cakrawala Pendidikan*, 30(2), 267–281.